

KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (TENAGA KERJA) BIDANG KONSTRUKSI DI INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Pudjo Utomo

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

ABSTRAK

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Desember 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian dilanjutkan pada KTT di Bali Oktober 2003, dengan mendeklarasikan pembentukan MEA pada 2015. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Salah satu butir kesepakatan adalah terbentuknya pasar tunggal dan kesatuan basis produksi didukung dengan aliran bebas barang, tenaga kerja terampil, jasa, investasi, dan modal. Sebagai konsekuensi disepakatinya MEA, maka Indonesia akan menjadi salah negara sasaran penerima manfaat dan sekaligus dampak. Tulisan ini akan membahas tentang kesiapan negara-negara anggota ASEAN khususnya Indonesia, dalam mengimplementasikan kesepakatan bersama MEA, yakni dari sisi produktivitas tenaga kerja, mengingat besarnya potensi sumberdaya manusia, dan besarnya angka pengangguran di Indonesia,serta rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar.

Kata kunci: MEA, arus bebas, tenaga kerja bidang konstruksi.

1. Pendahuluan

Pada konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk Komunitas ASEAN yang ditargetkan tercapai pada 2020. Dalam ketetapan *Bali Concord II*, Komunitas Ekonomi adalah salah satu dari pilar yang saling berkaitan yang menjadi landasan untuk terbentuknya Komunitas ASEAN. Keputusan penting pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu Januari 2007 adalah mempercepat jadwal pembentukan Komunitas ASEAN dari target semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. Percepatan jadwal ini semula diusulkan dalam KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur tahun 2005 dan diperkuat dengan rekomendasi dari *ASEAN Economic Ministerial Meeting* ke-38 pada Agustus 2006. Meskipun pemimpin ASEAN menyadari bahwa jangka waktu terlalu pendek untuk mencapai Komunitas ASEAN, namun perkembangan ekonomi di Asia menuntut percepatan proses integrasi ekonomi ASEAN. Dalam situasi persaingan ekonomi yang semakin tajam, ada kekhawatiran bahwa Asia Tenggara akan tertinggal jauh dari pesatnya pertumbuhan ekonomi China dan India. Gagasan membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN diharapkan bisa mengalirkan semangat baru untuk berintegrasi ke dalam dan meningkatkan daya saing kawasan agar dapat merebut investasi asing.

Sejalan dengan aspek ekonomi dalam Visi ASEAN 2020, Komunitas Ekonomi ASEAN diharapkan menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi di mana arus barang, jasa, investasi, modal dan pekerja terampil bisa bebas bergerak.

Menurut ASEAN Vision 2020 yang menjadi rujukan bagi pembentukan Komunitas ASEAN, tujuan akhir dari integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara adalah terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan komunitas ekonomi oleh organisasi

ASEAN, berikut adalah butir-butir penting yang diambil dari Deklarasi *Bali Concord II* mengenai konsep Komunitas Ekonomi ASEAN ¹:

- a. Komunitas Ekonomi ASEAN adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang digariskan dalam ASEAN Vision 2020 untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi.
- b. Landasan bagi Komunitas Ekonomi ASEAN adalah kepentingan bersama di antara negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas usaha-usaha integrasi ekonomi melalui kerja sama yang sedang berjalan dan inisiatif baru dalam kerangka waktu yang jelas.
- c. Komunitas Ekonomi ASEAN perlu menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, dengan mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi.
- d. Komunitas Ekonomi ASEAN perlu menjamin bahwa perluasan dan pendalaman integrasi ASEAN harus dibarengi dengan kerja sama teknik dan pembangunan dalam usaha mengatasi jurang pembangunan dan mempercepat integrasi ekonomi anggota baru (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam).
- e. Untuk mencapai komunitas ekonomi yang terintegrasi secara penuh, ASEAN perlu menerapkan langkah-langkah liberalisasi dan kerja sama.

Kawasan ekonomi yang stabil dan berdaya saing tinggi yang hendak dicapai adalah kondisi di mana barang, jasa dan investasi bisa bergerak bebas, modal lebih bebas bergerak, pembangunan ekonomi yang setingkat, serta berkurangnya kemiskinan dan jurang sosial-ekonomi di tahun 2020. Sedangkan konsep pasar tunggal dan basis produksi ditujukan untuk mengembangkan kawasan ASEAN agar lebih dinamis dan kuat sehingga bisa menjadi bagian dari rantai pemasok global melalui perdagangan bebas barang dan jasa, serta iklim investasi yang terbuka. Laporan ASEAN-ISIS (*Institute of Strategic and International Studies*) berjudul *Toward an ASEAN Economic Community*

¹ *ASEAN Economic Community Blueprint*, Jakarta: ASEAN Sekretariat, January 2008.

mengusulkan sasaran akhir dari integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara adalah menciptakan pasar yang terintegrasi penuh (*common market*) dengan mempertimbangkan bidang-bidang yang dianggap belum siap untuk berintegrasi lebih dalam bisa disusulkan kemudian.

Sejalan dengan aspek ekonomi dalam Visi ASEAN 2020, Komunitas Ekonomi ASEAN diharapkan menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi di mana arus barang, jasa, investasi, modal dan pekerja terampil bisa bebas bergerak. Pengertian pasar bebas bersama adalah terciptanya kondisi adanya perdagangan bebas secara penuh serta modal dan pekerja bebas bergerak. Hal ini mengindikasikan bahwa semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai kesepakatan yang tertuang dalam *Mutual Recognition Agreement* (MRA), yakni kesepakatan negara ASEAN untuk memberi fasilitas kepada para tenaga kerja terampil untuk bisa bergerak secara bebas di wilayah ASEAN. Kebebasan bergerak bagi pekerja berarti mereka berhak untuk tinggal dan mencari pekerjaan di seluruh kawasan ASEAN, dengan pengurangan atau penghapusan hambatan atas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa luar negeri dan tenaga kerja asing yang menyediakan keahlian tertentu dan datang ke negara konsumen.

2. Permasalahan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, beberapa masalah yang akan dihadapi oleh tenaga kerja, yaitu apakah tenaga kerja khususnya bidang konstruksi, mampu bersaing dengan tenaga kerja anggota ASEAN lainnya untuk mengambil keuntungan dan berkontribusi secara maksimal dari membesarnya pasar jasa tenaga kerja di kawasan ASEAN.

3. Pembahasan

Secara umum permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini antara lain pengangguran yang cukup tinggi, kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah, *skill* yang ala kadarnya, dan mutu pendidikan

yang rendah, serta belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Data yang dirilis Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2012 berjumlah sekitar 118 juta jiwa atau naik sebesar 1,7 % dari tahun sebelumnya, Malaysia sekitar 13 juta jiwa atau naik sebesar 2,6 %, Singapura sekitar 3 juta jiwa atau naik sebesar 4%, dan Vietnam sekitar 53 juta jiwa atau naik sebesar 1,8 %.

Data ini memperlihatkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dalam mengelola sumber daya yang ada di kawasan ASEAN. Dari jumlah pekerja tersebut, Indonesia menempati urutan pertama pada jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah. Hingga Februari 2014, jumlah pekerja berpendidikan SMP atau di bawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta jiwa pekerja di Indonesia.² Kondisi tersebut menyebabkan kualifikasi pekerjaan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia terbatas, yaitu hanya pada sektor-sektor informal, misalnya sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan lainnya. Berbeda jauh dengan tenaga kerja anggota ASEAN lainnya, rata-rata tingkat *skill* yang mereka miliki minimal setara dengan tingkat SMA ditambah pengetahuan khusus bidang ketrampilan tertentu. Kesiapan negara ASEAN lain dalam bidang tenaga kerja, untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga terampil yang semakin cepat dan terprogram, dilaksanakan oleh pemerintah bersama pihak swasta yang serius menggarap berbagai program khusus bagi tenaga kerja. Langkah-langkah strategis tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan, karena ditunjang dengan sistem birokrasi yang baik. Dalam kenyataannya, usaha tersebut menjadi bagian yang sangat penting bagi tenaga kerja untuk menaikkan posisi tawar mereka dalam kancah perebutan kesempatan kerja, baik di negara sendiri maupun di negara ASEAN lainnya.³

² Harian Kompas, Jum'at, 28 November 2014.

³ Pudjo Utomo, *Aspek-Aspek Hukum Usaha Jasa Konstruksi*, Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2010, hlm.15.

Dengan keunggulan-keunggulan dan dukungan penuh dari semua unsur di masing-masing negara, tidak lama lagi, Indonesia akan kebanjiran tenaga kerja asing yang terampil dan siap memperebutkan pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MRA.⁴

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Bidang Konstruksi di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa terciptanya integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Beberapa persiapan telah dilakukan Pemerintah untuk mengimbangi interaksi ekonomi sepuluh negara ASEAN dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Salah satu keunggulan SDM yang dimiliki Indonesia adalah kuantitas tenaga kerja produktif (usia 15-55 tahun) yang besar. Namun, bagaimana dengan kualitas/keterampilannya?

Pemerintah Indonesia menyikapi tantangan ini dengan beberapa kebijakan andalan dalam peningkatan kualitas SDM. Pertama adalah pengembangan SDM melalui *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.⁵ *Masterplan* ini merupakan salah satu dokumen percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang mempercepat pembangunan suatu wilayah dengan membangun konektivitas antara infrastruktur, pengembangan kebijakan, dan SDM-IPTEK serta mengintegrasikannya dalam satu kawasan perhatian investasi dengan suatu sentra kegiatan ekonomi utama sebagai fokus pengembangannya sehingga dapat menjadi pembangkit ekonomi wilayah di sekitarnya. Diharapkan program ini akan memberi dampak yang luar biasa pada peningkatan pendapatan per kapita di wilayah itu. Program

⁴ *Mutual Recognition Agreement*, merupakan kesepakatan negara ASEAN untuk memfasilitasi pergerakan arus tenaga kerja terampil secara bebas di semua wilayah ASEAN, dengan melaksanakan pengakuan-pengakuan timbal balik, yang mencakup jasa tenaga kerja teknik, jasa tenaga kerja keperawatan, jasa tenaga kerja arsitektur, jasa tenaga kerja dokter praktik, dan jasa tenaga kerja dokter gigi.

⁵ Data terakhir diambil dari hasil Rapat Koordinasi Menko Perekonomian pada tanggal 7 Februari 2014

nasional ini disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan menargetkan pendapatan per kapita sebesar 13 juta-15 juta rupiah pada tahun 2025.

Pada perkembangannya hingga februari 2014, telah terdapat 279 triliun rupiah investasi dalam bidang infrastruktur yang akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, energi, telekomunikasi dan irigasi. Dalam dokumen tersebut tercatat setidaknya dibutuhkan 2-3 juta tenaga kerja konstruksi (tenaga tetap dan tenaga temporer) untuk pembangunan infrastruktur yang dibangun sampai dengan tahun 2015.

Untuk menciptakan tenaga konstruksi yang terampil tersebut akan direalisasikan investasi sebesar 21 triliun rupiah untuk peningkatan kualitas SDM yang terdiri dari peningkatan SDM dalam lingkup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Akademi Komunitas, Politeknik dan Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, Program Pengembangan Iptek, dan program pemuktakhiran lainnya.

Kedua, melalui peraturan perundang-undangan, salah satu aspek hukum yang telah ditetapkan dalam mengatur bidang konstruksi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut berfokus pada pekerjaan konstruksi, pengguna konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, kegagalan konstruksi, forum jasa konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

Sampai Mei 2014, sudah ditetapkan peraturan pelaksanaan dalam jasa konstruksi, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor. 92 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor. 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Saat ini, peraturan teknis telah disiapkan dalam bentuk beberapa Peraturan Menteri. Ke depannya melalui peraturan ini, akan ada sinkronisasi keterampilan pekerja antar negara melalui sertifikasi yang berstandar internasional.

Dari sisi kelembagaan, Kementerian Pekerjaan Umum telah membentuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) yang nantinya harus bekerjasama dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dalam bentuk *Joint Operation* (JO) atau *Joint Venture* (JV) dengan menyikapi perlindungan jasa konstruksi di Indonesia dengan Pergerakan Tenaga Kerja (*Movement of Natural Person/MNP*), dimana tenaga kerja asing secara umum dibatasi pada tiga status, yaitu: *business visitor*, *intra-corporate* (dalam satu perusahaan) dan *contracted person* (tenaga kerja yang dipekerjakan oleh BUJKA yang telah mendapat kontrak kerja). Artinya secara umum, calon tenaga kerja belum dapat melamar pekerjaan secara individual di negara yang di luar negaranya.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bobby Gafur mengatakan, bahwa saat ini 70 persen kontraktor yang digunakan di Indonesia berasal dari luar negeri. Padahal, kontraktor lokal mampu bekerja dengan kualitas yang tidak kalah dibandingkan kontraktor asing. Namun, posisi *doing business* Indonesia dari aspek tenaga kerja yang dilaporkan *World Bank* berada pada posisi kurang kondusif. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia disebutkan sebagai *labour pains: hard to hire, hard to fire, and costly too.*⁶

b. Progress Tenaga Kerja Konstruksi negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Singapura adalah negara yang paling siap dalam integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan tentu akan mengambil keuntungan yang besar setelah ditetapkannya kesepakatan tersebut. Masyarakat Singapura juga dikenal memiliki modal yang besar yang dapat diinvestasikan namun hanya kekurangan lahan untuk investasi. Selain kesiapan modal, dari latar belakang pendidikan, tenaga kerja Singapura memiliki tingkat keterampilan dan

⁶ *Liputan6.com* : 29/10/2014

manajerial yang tinggi dan lebih siap bersaing dibandingkan dengan tenaga kerja di 9 Negara berkembang lainnya di ASEAN.

Pada sisi konstruksi, tenaga kerja Singapura telah memiliki standar gaji yang diterima di beberapa negara. Pada tahun 2014, kisaran gaji untuk perekayasa, dalam hal ini teknik sipil adalah sekitar 3.200-5.000 dolar Singapura atau 16 juta-20 juta rupiah per bulannya.

Selain itu kejelasan jenjang karir di bidang keteknikan sangat jelas dan transparan, misalnya untuk bidang teknik sipil: jabatan *Project Manager* akan dilalui oleh seorang pekerja dari menjadi *Assistant Project Manager*, selanjutnya menjadi *Project Manager* dan akhirnya menduduki jabatan sebagai *Senior Project Manager*.

Dari sisi kuantitas, jumlah tenaga kerja konstruksi Singapura saat ini berkisar 35 ribu-40 ribu orang,⁷ meningkat sekitar 37% dari jumlah tenaga kerja di tahun 2010. Dalam hal ini, Singapura melihat peluang yang besar dan terbuka dalam kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, karena di satu sisi tenaga kerja konstruksi meningkat dan lahan investasi minim sementara lahan investasi sangat terbuka lebar di negara-negara ASEAN.

Malaysia merupakan negara yang sangat giat dan serius dalam pengembangan SDM untuk memenuhi tantangan global sehingga tak heran apabila di negara ini mayoritas penduduknya menguasai beragam bahasa, antara lain bahasa mandarin, Inggris, dan bahasa Melayu. Hal ini menjadikan Malaysia negara yang ramah terhadap investasi asing.

Kebijakan kunci yang menjadi andalan dalam pengembangan SDM di Negara Malaysia di antaranya adalah *Economic Transformation Programme* (ETP) Malaysia. Program nasional Malaysia ini dibentuk tahun 2010 di mana implikasinya hampir sama dengan MP3EI di Indonesia. Program ini menargetkan pendapatan per kapita sebesar USD 15.000 atau sekitar 15 juta rupiah pada tahun 2010. Dari sisi target pencapaian, pemerintah Negara

⁷ *Change in Employment by Sector*,
<http://www.singsat.gov.sg/statistics/browse/labour.html>

Malaysia menargetkan minimum upah buruh sebesar RM 800 atau sekitar 2,8 juta rupiah untuk tahun 2013.

Dari sisi tenaga kerja, tenaga kerja di Malaysia saat ini memiliki tingkatan keterampilan yang berjenjang dan bersertifikasi, baik itu di bidang konstruksi atau kegiatan ekonomi lainnya. Berbeda dengan Indonesia, saat ini Pemerintah Negara Malaysia lebih menfokuskan penyiapan tenaga kerja di tahap manajerial dan wirausaha, partisipasi dan pemberdayaan wanita dalam semua lini pengambil keputusan, serta kerjasama pelatihan dengan unit usaha asing (misalnya SAP, Google, HUAWEI, dan iOS).

Dengan jumlah pekerja konstruksi hingga 700-767 ribu atau naik sekitar 5-10 persen per tahun,⁸ ekspansi tenaga kerja konstruksi di Negara Malaysia masih dapat mengimbangi permintaan tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan lahan domestik, mungkin sekitar 4-5 tahun dari 2015 dan akan berinteraksi dengan bidang konstruksi di Indonesia.

Dukungan Pemerintah Malaysia terhadap tenaga kerja konstruksi dapat dilihat dari berbagai kebijakan modernisasi Undang-undang Tenaga Kerja dan peningkatan tingkat keselamatan pekerja, khususnya dalam bidang konstruksi. Dalam Undang-undang di negara tersebut jelas teraplikasi adanya minimum pensiun umur 60 tahun.

Vietnam, merupakan salah satu negara yang penting untuk dibahas dalam tulisan ini mengingat selama 20 tahun terakhir negara ini mengalami konsistensi ekonomi yang baik. Mengejar ketertinggalan ekonomi dengan negara lain tidaklah mudah, seperti yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Vietnam. Negara yang masuk sebagai anggota ASEAN pada tahun 1995 ini mengupayakan percepatan pembangunan ekonomi dengan membuka peluang investasi bagi negara lain, menjalin kerjasama regional, dan melihat

⁸ Labour Force Survey Report, Malaysia 2012, http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1864&Itemid=1&lang=en

peluang juga pada terbukanya interaksi masyarakat ekonomi di regional ASEAN.

Ketenagakerjaan di negara Vietnam diatur dalam revisi peraturan ketenagakerjaan dan kerjasama industri (*Labor Code 12 June 2012*) yang efektif berlaku pada tahun 2013. Revisi peraturan ketenagakerjaan ini mengedepankan pengelolaan investasi asing di negara tersebut. Kemudian juga ditetapkan beberapa peraturan pendukung tenaga kerja (termasuk konsep rekrutmen, kontrak kerja, asuransi sosial, jam kerja, disiplin tenaga kerja, dan solusi permasalahan). Selain itu peraturan antara pemberi dan penerima tenaga kerja juga turut diatur dalam peraturan tersebut baik lokal ataupun dari luar negeri sehingga keberadaan tenaga kerja yang bekerja pada investor dalam atau luar negeri dapat terpantau dengan baik. Fasilitas lain yang mempermudah pihak asing untuk investasi adalah pemberian ijin yang mudah dari pemerintah Vietnam (MOLISA).

4. Penutup

1. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia secara serius telah mempersiapkan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerjanya dengan berbagai program dengan biaya yang cukup besar, salah satunya dengan beberapa kebijakan andalan dalam peningkatan kualitas SDM. Pertama adalah pengembangan SDM melalui *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang dirilis tahun 2014. Untuk menciptakan tenaga konstruksi yang terampil tersebut akan direalisasikan investasi sebesar 21 triliun rupiah untuk peningkatan kualitas SDM yang terdiri dari peningkatan SDM dalam lingkup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Akademi Komunitas, Politeknik dan Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, Program Pengembangan Iptek, dan program pemuktahiran lainnya. Namun, tidak dibarengi dengan pembenahan kurikulum yang berhubungan dengan tujuan diadakannya program. Apabila dilihat dari aspek kurikulum pendidikan di

Indonesia pada 2013 dengan basis kompetensi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang memiliki kepekaan yang cukup lambat dalam menyikapi urgensi masa interaksi bebas masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini memang sulit dibandingkan karena indikator pembandingan kurikulum antara negara-negara di ASEAN sangat jauh berbeda, tentu juga akan menghasilkan kualitas SDM yang berbeda pula.

Begitu pula halnya dalam ranah yang lebih teknis lagi, kekurangan Indonesia dalam menghadapi kebijakan regional ini adalah rencana aksi yang belum konkrit, khususnya dalam hal menjaga stabilitas pendapatan per kapita dan pemetaan tenaga kerja terampil. Dalam bidang konstruksi, belum semua negara dalam ASEAN mengikuti standar baku dalam lingkup rekayasa konstruksi sehingga ini menjadi salah satu tantangan yang membuat tenaga kerja Indonesia sulit bekerja di negara-negara lain anggota ASEAN.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja bidang konstruksi Indonesia, belum siap untuk bersaing dalam hal kualitas dengan tenaga kerja dari anggota ASEAN lainnya, terutama tenaga kerja dari Negara Singapura maupun Malaysia. Pada perkembangan negara yang paling siap dalam integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN hanyalah Negara Singapura dan Malaysia.

2. Saran

Kiranya amat tepat apabila pemerintah segera mempersiapkan langkah dan strategi menghadapi ancaman dampak negatif dari MEA dengan menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan nasional yang diarahkan agar dapat lebih mendorong dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan industri sehingga kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi dunia usaha ataupun profesional meningkat. Pemerintah diharapkan pula untuk menyediakan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Economic Community Blueprint, Jakarta: ASEAN Secretariat, January 2008.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT), Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2009

Pudjo Utomo, *Aspek-Aspek Hukum Usaha Jasa Konstruksi*, Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2010.

Changes In Employment By Sector,

http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse_by_theme/labour.html

Peluang, Tantangan dan resiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, <http://www.crmsindonesia.org/node/624>, di akses tanggal 9 September 2014.

MEA 2015 dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia,

<http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/mea-2015-dan-kesiapan-sumber-dayamanusia-indonesia.php>, diakses tanggal 5 September 2014.

Menuju ASEAN Economic Community,

[http://ditjenkpi.kemendag.go.id/web site_kpi/Umum/Set ditjen en/Buku% 20Menuju% 20ASEAN% 20](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/web%20site_kpi/Umum/Set%20ditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf)

[ECONOMIC% 20COMMUNITY% 202015.pdf](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/web%20site_kpi/Umum/Set%20ditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf), diakses tanggal 9 September 2014.

Harian Kompas, Jum'at, 28 November 2014.

Liputan6.com : 29/10/2014

Labour Force Survey Report, Malaysia 2012,

http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1864&Itemid=1&lang=en